

## DAFTAR PUSTAKA

- Dwinarwoko. Bagong Suyanto.2006. *sosiologi teks pengantar dan terapan*.Jakarta: kencana
- Desriza Ratman, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengkata Medik dengan Konsep Win-Win Solition*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), h.133.
- Heinz Wehrich and Harold Koontz, *Management A.Global Perspective Tent Edition* (New York : McGraw-Hill, Inc., 1993)
- Hermanto. Winarno 2009. *ilmu sosial dan budaya dasar*. Jakarta timur: PT bumiaksara
- Moleong, Lexy J. (2000). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nur, Indriantoro, dan Bambang Supomo. (2013). *Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Grasindo, Yokyakarta.
- Noeng Muhadjir. (2000) *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin.
- Horoepoetri, ddk (2003). "*Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan* ". Jakarta : Walhi
- Philipus. Nurul Aini. (2004). *sosiologi dan politik*. Jakarta: PT Raja grafindopersada.
- Pruit. Dean. G . jefry Robin, *teori konflik sosial (terjemahan)*, putaka belajar.
- Pruitt. Robin. (2008)*Teori konflik sosial* Yoygakarta: Pustaka belajar.
- Susan novri . (2017). *Pengantar sosiologi konflik*. Surabaya: pernanda media
- Susan. (2009) . *Sosiologi konflik dan isu-isu konflik kontemporer*. Jakarta: prestasiPustaka
- Sockanto soerjono. (2015). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: rajawali fers
- Tjokroadmidjojo, Bintoro. 2010. *Pengantar Administrasi pembangunan*. LP3ES. Jakarta.

### Skripsi

- Skripsi Muhammad Solichin. (2017)dengan judul "*konflik tampal batas antara kahupaten mesujidan kahupaten tulang hawang*"

Skripsi Mursyidyansah (2015) dengan judul penelitian "*Konflik tapal batas antara kabupaten banjar dengan kabupaten tanahumbu Propinsi kalimantan selatan*".

**Dokumen**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan  
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

[http://kedesa.id/id\\_ID/pemekaran-desa-harus-sesuai-uu-desa-bukan-mengejar-dana-desa/diakses terakhir tanggal 7 juli 2021](http://kedesa.id/id_ID/pemekaran-desa-harus-sesuai-uu-desa-bukan-mengejar-dana-desa/diakses%20terakhir%20tanggal%207%20juli%202021)

Undang-undang No.11 Tahun 2006, Bab I, Pasal 1 angka 20.

Permendagri No 45 Tahun 2016 Pedoman dan Pengesahan batas desa

Undang-undang No.11 Tahun 2006 Pasal 115 tentang Pemerintah Aceh